**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional, Indonesia aktif melakukan kerjasama internasional, baik pada lingkup bilateral, multilateral, maupun lingkup regional. Seperti misalnya kerjasama bilateral Indonesia-Philipina di bidang perdagangan ekspor-impor, menjadi anggota G20 yang merupakan bentuk kerjasama multilateral, serta menjadi anggota ASEAN (*Asociation of South East Asia Nation*) sebagai bentuk kerjasama regional.

G20 sendiri dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilarisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistematik. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak positif dan sistematik yang signifikan bagi Negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat tidak menjadi anggota G20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di Negara-negara lain.[[1]](#footnote-1)

Posisi G20 sebagai sebuah forum kerjasama internasional yang berlandaskan komitmen dan konsensus yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Walau tidak mengikat secara hukum, bahwa G20 secara diplomatik diakui sebagai sebuah forum yang memiliki reputasi yang tinggi.

Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum *intergovernmental* ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia klub ekslusif ini merupakan wilayah bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia memahami posisi strategis dan tanggungjawab untuk mewakili Negara-negara berkembang. Pertama Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang karena pertumbuhann ekonominya tercatat cukup penting di antara Negara-negara berkembang lainnya. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga, Indonesia merupakan Negara demokrasi baru dengan keanggotaan Indonesia dapat memberikan insiprasi ke Negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi. Keempat, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan anggota satu-satunya ASEAN yang menjadi anggota tetap G20. Tentu saja bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang di masa lampaunya pernah mengalami krisis ekonomi dahsyat dan kini telah berhasil mengatsainya perlahan dengan relative baik sehingga bisa bergabung dengan anggota G20.[[2]](#footnote-2)

Degan posisi strategis Indonesia diyakini menajdi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G20. Selain potensi sebagai *global buyer* yang besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak signifikan ke stabilitas pertumbuhan ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Tengggara, dan akan lebih baik lagi lanjut dalam kestabilan perekonomian Asia dan Dunia. Dengan memiliki sejumlah keunikan maupun posisi strategis , tugas Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia diharapkan dapat memadukan kepentingkan Negara-negara berkembang secara umum dan kepentingan-kepentingan Negara di Asia Tenggara.

Dinamika kerjasama internasional yang selama ini dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, akhirnya membentuk sebuah pola *North-south*, atau sebuah pola ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju. Namun dalam dinamikanya, pola ini menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang, negara berkembang selalu dianggap berada pada posisi minoritas. Pola kerjasama yang ada pun terlihat samar karena terlihat anya sebagai kegiatan pemberian bantuan (*aid*) dari negara maju ke negara berkembang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, maka dibentuklah sebuah kerangka kerjasama internasional baru, yaitu KSST (Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular) , KSST merupakan sebuah unifikasi dari dua buah kerangka kerjasama internasional, yakni KSS (Kerjasama Selatan Selatan) dengan Kerjasama Triangular. KSS adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua atau lebih negara-negara berkembang yang meliputi kerjasama dibidang pembangunan, dan pertukaran pengetahuan dan sumberdaya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknis. Sedangkan Kerjasama Triangular sendiri merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara-negara berkembang dengan pihak ketiga, yakni negara maju.

Perubahan konstelasi global yang terjadi dewasa ini menjadi pendorong bagi negara-negara berkembang untuk dapat semakin berperan dalam sektor perekonomian dan kerjasama pembangunan. Perubahan ini antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di *new emerging countries*, seperti Cina, India, Brasil dan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi dinegara-negara maju sedikit terhambat. Hingga akhirnya fenomena ini mengakbatkan peningkatan saling ketergantungan antara *advanced economies dan emerging economies*.[[3]](#footnote-3)

Kondisi-kondisi yang terjadi tersebut semakin mendorong KSST agar bertransformasi dan tidak hanya berfokus pada kerjasama teknik, melainkan harus diperluas, agar dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara berkembang yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama sebagai salah satu faktor pendorong pencapaian pembangunan. Penguatan pada sektor kerjasama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pun harus ditingkatkan. Seiring dengan peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang sebagai “*middle income countries*”, memungkinkan negara-negara berkembang untuk muncul sebagai “*new emerging donors*” pada KSST.

KSST sendiri telah menjadi pendekatan yang umum bagi negara donor dalam kerjasamanya untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain. Pertukaran akan kebijakan, praktik, teknologi dan keahlian antaranegara-negara berkembang yang dikenal dengan Kerjasama Selatan Selatan, memiliki sejarah panjang dan telah berkontribusi dalam pembangunan internasional setengah abad lamanya. Sementara, kerjasama antar negara donor tradisional (umumnya negara maju atau organisasi internasional) , negara “*new emerging donors*” (*middle-income country*) dan negara penerima (*recipient*) yang dikenal sebagai kerjasama triangular, telah menarik perhatian negara-negara selatan untuk memanfaatkan dukungan dari negara maju dalam keahlian dan pengalaman dari sesama negara selatan.

Salah satu tujuan dari kerangka Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular ini adalah memungkinkan negara berkembang memperoleh kerjasama berupa pertukaran pengetahuan dan sumberdaya yang benar-benar sesuai kebutuhan. Indonesia sendiri aktif terlibat dalam KSST sejak Konfrensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955, konfrensi ini menjadi titik awal dari pergerakan politik pembangunan bersama negara dunia ketiga untuk melakukan kerjasama internasional. Penguatan peran Indonesia di KSST lebih terlihat signifikan dengan masuknya indonesia sebagai *Middle Income Country* atau negara dengan pendapatan menengah, posisi indonesia saat ini tidak hanya sebagain negara penerima (*recipient*) tapi juga sebagai provider. Keterlibatan aktif indonesia di KSST merupakan peran baru indonesia untuk membantu pembangunan negara yang tertinggal, sekaligus sebagai sarana investasi politik dan diplomasi ekonomi dengan memanfaatkan KSST untuk menembus pasar produk barang dan jasa Indonesia di pasar global. Dengan kata lain Indonesia memiliki modal dasar untuk turut berperan aktif dalam KSST, sebagaimana landasan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan politik bebas aktif menjadikannya modal dasar bagi Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama di dunia internasional dan telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan berbagain negara.

KSST menjadi fokus dari G-20 pada Koferensi Tingkat Tinggi di Seoul pada tahun 2010 meminta untuk dibentuknya Task Team on South-South Cooperation and Triangular (TT-SSTC).[[4]](#footnote-4) G-20 bukan sekedar kelompok biasa karena keanggotaannya terbatas namum memiliki tujuan ambisius untuk memberikan dampak secara global.[[5]](#footnote-5) G-20 sebagai organisasi multilateral memiliki kepentingan kolektif bersama dan salah satunya adalah terkait Overseas Development Aids (ODA). Isu mengenai ODA ini telah menjadi perhatian khusus dari anggota G-20 sejak KTT G-20 di London. Dalam KTT G20 tersebut anggota G20 berkomitmen untuk memenuhi target Millenium Development Goals.[[6]](#footnote-6)

Sebagai salah satu anggota G-20 tentunya Indonesia perlu untuk mengimplementasikan kepentingan kolektif G-20 terkait isu pembangunan tersebut. Seperti yang sudah dibahas, Indonesia memang telaf aktif dalam memberikan bantuan kepada sesama negara berkembang melalui skema KSST. Dalam Triangular Cooperation and Aid Effectiveness (2009) Fredelone menjelaskan bahwa kerjasama pembangunan internasional dewasa ini semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya peran-peran negara berpenghasilan menengah bukan hanya sebagai peneria bantuan lagi tetapi juga sebagai pemberi bantuan.[[7]](#footnote-7) Dengan aktifnya Indonesia dalam mengimplementasikan bantuan pembangunan dalam kerangka KSST, Indonesia sudah turut berperan aktif dalam mewujudkan mutual interest (kepentingan kolektif) forum G-20. Terlebih lagi Indonesia dipercaya sebagai Co-Chair dalam TT-SSTC, dan itu berarti Indonesia berada di garis terdepan dalam menangani isu KSST di G-20.[[8]](#footnote-8)

Bagi Indonesia, pengembangan KSST semakin penting dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota forum G20, peran Indonesia di KSST pun berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan mejadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di KSST sendiri, bukan hanya sekedar menjadi penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima.

Keangotan Indonesia di G20 memungkinkan Indonesia untuk memberikan kontribusi penting dengan menyuarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perubahan dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang.peran ini semakin penting seiring dengan perkiraan bahwa posisi Indonesia yang akan meningkat menjadi kekuatan ekonomi ke sepuluh pada 2020, dan kelima pada 2030.[[9]](#footnote-9)

KSST menjadi wahana yang sangat strategis bagi Indonesia sebagai *new emerging donors* untuk dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan pemberi bantuan sekaligus. Secara bertahap hal ini akan menjadi modal bagi terbangunnya desain kerjasama pembangunan internasional yang lebih berkeadilan. Pentingnya kemitraan antara negara maju dengan aktor lain dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan menjadi perhatian *Development Assistance Comitee (DAC) – Organisation for EconoMIC Co-operation and Development (OECD)*. Bagi Indonesia hal ini menjadi sebuah peluang untuk terus berperan dalam mengembangkan skema kerjasama triangular dalam kerangka pelaksanaan bertahap dari peran ganda dan realisasimdari paradigma *donorship* kepada *partnership* sebagaimana semangat dari *Jakarta Commitment*.[[10]](#footnote-10) Tujuan pelaksanaan KSST Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian bersama atas dasar solidaritas, kepentingan bersama dan keuntungan bersama sesama negara selatan.

Sejak tahun 2010, KSST telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Hal tersebut mengamanatkan suatu kebijakan yang komperhensif dan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama pembangunan internasional. Pada tahun yang sama, Tim Kornas KSST atau Tim Koordinasi Nasional Indonesia untuk Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular didirikan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengatasi masalah struktur kelembagaan yang kompleks dari penanganan KSST di Indonesia. Tim Kornas sendiri terdiri dari 4 Kementrian inti sebagai empat lembaga utama dalam penanganan KSST, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan Kementrian Luar Negeri (Kemlu). Sesuai dengan salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu untuk mengkonsolidasikan KSST Indonesia melalui pembentukan kerangka hukum dan memperkuat koordinasi kelembagaan, merupakan hal yang penting untuk membentuk suatu lembaga (agensi) tunggal atau *single agency* untuk mengakomodasi segala macam kegiatan KSST Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2016, Presiden telah mengamanatkan bahwa tahun ini pemerintah Indonesia perlu menyusun Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pemberian Bantuan Teknik *(Single Agency For Technical Cooperation*).

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas sejauh mana pengaruh G20 terhadap peran Indonesia sebagai new emerging donors dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular ini, dan hal inilah yang mendasari pemilihan topik/judul skripsiini. Penulis mengangkat judul **“KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM G20 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERAN INDONESIA DI KERJASAMA SELATAN SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST).”**

1. **Pembatasan dan Perumusan Masalah**
2. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, terkait dengan judul laporan praktikum yang penulis ambil, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keanggotaan Indonesia di G20?
2. Bagaimana peran Indonesia di KSST?
3. Bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia dalam G20 terhadap peran Indonesia di KSST?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperlukan pembatasan masalah dengan tujuan memfokuskan penelitian terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Maka dari itu penjelasan dari penelitian ini akan membahas seputar pengaruh keanggotaan Indonesia di G20 dan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” yang mejadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di KSST.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan dalam latar belakang sebelumnya, maka untuk memermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yang diharapkan dapat menjadi rumusan dalam menganalisa masalah, yaitu:

**“Bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia dalam G20 terhadap peran Indonesia sebagai ‘*new emerging donors’* di KSST?”.**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   * 1. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagaimana yang telah penulis rinci di bawah ini.

1. Untuk memahami bagaimana forum G20 terbentuk.
2. Untuk mengetahui posisi Indonesia di forum G20.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi bagaimana G20 mempengaruhi peran Indonesia di KSST.
4. Untuk memahami pelaksanaan program KSST yang dilakukan Indonesia saat ini.
5. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam pembentukan Lembaga penanganan KSST.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan melatih cara berfikir, memahami serta mengamati mengenai masalah hubungan internasional khususnya masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang jelas mengenai peran Indonesia di KSST itu sendiri.
3. Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis bagi masyarakat secara universal baik secara teoritis atau praktis sehingga dapat menjadikan refrensi keilmuan dan memperkaya khazanah pemikiran studi khususnya untuk pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Penelitian ini dapat dijadikan pembanding bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait yang dibahas, dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literatur tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah hubungan internasional.
5. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh mata kuliah Praktikum Profesi pada program strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
6. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
7. **Kerangka Pemikiran**

Dengan tujuan dasarnya untuk menjelaskan permasalahan dan mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam, penulis mengutip teori-teori para ahli dan konsep ilmiah yang berkorelasi dengan tema, judul, masalah, dan objek penelitian untuk memberikan landasan pemikiran agar diakui keabsahannya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami secara akurat dengan metode dan konsep untuk menghindari mispersepsi dan misinterpretasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Kerangka teoritis sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dimana terdapat kumpulan teori, konsep, pandangan para pakar, dan sumber ilmiah lain yang tentunya memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penulisan secara sistematis sehingga menciptakan formasi yang komperhensif sebagaimana kaidah penulisan literatur ilimah.

Dalam menganalisis legalitas dan efisiensi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Negara berkembang dan Negara maju di dalam forum G20, serta dalam pembentukan Kerjasama Internasional dalam kaitannya dengan KSST, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional, teori Organisasi internasional, teori kepentingan nasional, konsep regionalism/kawasan, dan teori ekonomi politik internasional tentang bantuan luar negeri. Penulis merasa bahwa beberapa konsep tersebut dapat mendukung analisis yang akan penulis gunakan dalam permasalahan ini.

Berkaitan dengan peran aktif Indonesia dalam forum G20 dan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, Teori pertama yang penulis gunakan adalah Teori Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional merupakan salah satu ruang linkup dari Hubungan Internasional yang memiliki makna sebagai suatukeharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini terjadi antara Indonesia dengan negara-negara yang terlibat dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular guna saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing negara. Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular sendiri berfokus kerjasama pada bidang pembangunan, dan pertukaran pengetahuan dan sumberdaya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknis.

Pertama, menurut **Koesnadi Kertasasmita** yang dimaksud dengan kerjasama internasional yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Organisasi Internasional, yaitu :

**“Kerjasama Internasional terjadi karena ‘Nation Understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”**[[11]](#footnote-11)

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular bertujuan untuk saling memenuhi tujuan dan kepentingan dari tiap-tiap negara tersebut. Kepentingan yang dituju tersebut diwujudkan melalui kerjasama di bidang kerjasama pemberian bantuan teknis maupun bantuan pembangunan ke negara-negara penerima (*recipient*) lain. Kerjasama pemberian bantuan teknis maupun bantuan pembangunan ini memiliki tujuan untuk mencari solusi atas tantangan bersama dibidang pembangunan. Melalui Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular ini diharapkan dapat menjadi salah satu modal Indonesia untuk memperkuat perannya dalam kerjasama global maupun regional untuk membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam. Hal tersebut ditunjang dengan masuknya Indonesia dalam G20 dan menjadikan status Indonesia sebagai “*new emerging donors*” untuk Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular ini. Begitupun dengan negara-negara yang tergabung dalam KSST, yang juga memiliki kepentingan yang serupa.

Kedua, konsep kerjasama internasional lainnya dapat dipahami melalui teori yang dikemukakan oleh **Kalevi Jaakko Holsti**, sebagai berikut:

1. ***Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak***
2. ***Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan***
3. ***Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya membantu Negara itu untuk mencapai keppentingan dan nilai-nilainya***
4. ***Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan***
5. ***Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.****[[12]](#footnote-12)*

Ketiga, Kerjasama Internasional menurut **James E. Dougherty** dan **Robert L. Pfaltzgraff** yaitu:

**“Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan Negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif”**[[13]](#footnote-13)

Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara Selatan Selatan tentunya bukan didasarkan pada unsur paksaan ataupun intimidasi. Karena kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara, maka terbentuklah sebuah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dari negara-negara ini, dapat terjadi melalui lembaga pemerintahan atau organisasi diluar pemerintah. Indonesia sendiri belum memiliki lembaga penyalur bantuan pembangunan khusus, namun telah membentuk Tim Koordinasi Nasional sebagai lembaga koordinasi kerjasama pembangunan internasional di KSST itu sendiri. Namun dalam dinamika perjalanannya, sesuai dengan *Grand Design* Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, lembaga khusus yang nantinya berfungsi secara otoritatif dalam penyaluran bantuan luar negeri Indoneisa baru akan dibentuk pada tahun 2025.

Teori-teori mengenai kerjasama internasional yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menjadi pendukung analisis dari penelitian ini. Dengan melakukan sebuah kerjasama, maka kebutuhan dan kepentingan dari negara negara pelaku kerjasama dapat terpenuhi. Kerjasama Internasional dilakukan bukan karena adanya unsur paksaan melainkan adanya kepentingan dan juga dapat dilakukan bukan melalui lembaga pemerintahan saja, melainkan lembaga non pemerintahan pun dapat dilakukan.

Teori yang kedua, penulis menggunakan **Teori Organisasi Internasional** ,G20 yang dalam permasalah yang penulis angkat, yang merupakan organisasi internasional multilateral, memiliki hak dan kewajiban serta otoritas dalam menyelesaikan konflik (tujuan bersama) yang berkaitan dengan Negara anggota organisasinya, hal itu penulis angkat berlandaskan acuan yang diungkapkan oleh **Teuku May Rudy**, mengenai organisasi internasional, yang mengungkapkan bahwa :

***“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.****[[14]](#footnote-14)*

Adapun pendapat mengenai organiasasi internasional menurut **T. Sugeng Istanto** adalah sebagai berikut :

***“Yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam artian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak yang bersifat internasional dan untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara dari berbagai negara, atau pemerintah negara. Adapun yang menyangkut tujuan internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.”****[[15]](#footnote-15)*

Secara sederhana, dari beberapa bantuan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerjasama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Menurut **Clive Archer (1983 : 136-137),** peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu adalah sebagai berikut :

1. ***Sebagai instrument (alat/sarana),Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.***
2. ***Sebagai arena (forum/wadah), Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.***
3. ***Sebagai pelaku (aktor), bhawa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomus dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksana kepentingan anggota-anggotanya.***

Untuk fungsi organisasi internasional menurut **A. Le Roy Bennet** (Anak Agung Banyu Perwita, 2005: 97) adalah sebagai berikut :

1. **Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang di lakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.**
2. **Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.**

Terkait dengan KSST itu sendiri belum adanya definisi baku mengenai apa itu Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular, sehingga setiap peneliti memiliki definisi yang berbeda-beda terkait Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. KSST sendiri merupakan sebuah unifikasi dari dua buah kerangka kerjasama internasional, yakni KSS (Kerjasama Selatan Selatan) dengan Kerjasama Triangular.

Secara sederhana, Kerjasama Selatan Selatan dapat dipahami sebagai sebuah bentuk kerjasama antar dua atau lebih negara-negara berkembang yang meliputi kerjasama dibidang pembangunan, dan pertukaran pengetahuan dan sumberdaya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknis. **Kokange** menjelaskan secara singkat dalam tulisannya *The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection* bahwa :

**“Kerjasama Selatan Selatan sebagai proses dimana dua negara atau lebih yang sedang berkembang mengejar tujuan pembangunan individu atau kolektif melalui kerjasama berupa pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumberdaya, dan kecakapan teknis. Sedangkan Kerjasama Triangular sendiri merupakan sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan tiga negara atau lebih dengan peran atau posisi yang berbeda-beda di masing-masing pihak. Kerjasama Triangular tidak hanya melibatkan negara-negara selatan atau negara berkembang saja tetapi juga melibatkan negara-negara utara atau negara maju dan juga institusi multilateral seperti lembaga donor atau organisasi internasional seperti PBB dan G20. Peran negara maju melalui lembaga dan institusi multilateral seperti PBB hanaya sebagai pendukung saja, inisiatif kerjasama tetap harus dilakukan oleh negara-negara selatan. Skema konfigurasi yang melibatkan negara selatan, negara maju, dan institusi multilateral ini kemudian disebut sebagai kerjasama triangular”**[[16]](#footnote-16)

. Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular dapat digambarkan melalui gambar dibawah ini.

Negara Donor/ Institusi Multilateral

Negara Selatan Pemberi bantuan / Negara New Emerging donors

KSST

Negara Selatan Penerima Bantuan

**Gambar 1.1** Skema Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

Teori yang selanjutnya, penulis menggunakan Teori Kepentingan Nasional. KSST sendiri menjadi wadah bagi kepentingan nasional negara-negara berkembang yang pada dasarnya memiliki karakteristik, kepentingan-kepentingan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kerjasama antar negara anggota yang memberikan manfaat untuk negara-negara terkait.

Dalam hubungan internasional tentunya ada suatu hal yang mendasari mengapa suatu negara melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lain. Adanya suatu tujuan tertentu yang menjadi fokus suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain. Tujuan dan fokus tersebut adalah kepentingan nasional *(National Interes*t) yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan interaksi dengan negara lain. [[17]](#footnote-17)

**Lerche** dan **Said** mendefinisikan kepentingan nasional sebagai,

***“The general long-learn and contiming purpose wich the state, the nation and the governmental all see themselves as serving.”***

Dalam proses mencapai kepentingan nasional, setiap negara akan saling berhubungan dengan negara lain. Hubungan atau interaksi yang terjalin antar satu atau lebih dari dua negara yang berkesinambungan atau intens cenderung akan membentuk sebuah wadah, wadah tersebut bisa berbentuk Organisasi Internasional maupun sebuah konsep Kerjasama Regional/Kawasan.

Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.[[18]](#footnote-18) Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. **Hettne** dan **Soderbaun** mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama.[[19]](#footnote-19) Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural.

Terbentuknya KSST sendiri didasari dari pola *North-South* yang menyebabkan adanya ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju yang dalam dinamikanya, pola ini menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang, negara berkembang selalu dianggap berada pada posisi minoritas. Sehingga terbentuklah sebuah kerangka Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular yang didalamnya terdapat negara selatan selatan (berkembang) yang tergabung dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencari solusi atas tantangan bersama dibidang pembangunan, dan mengimbangi ketidak seimbangan yang terjadi antara negara maju (*north*) dengan negara berkembang (*south*).

Dalam melihat keseriusan Indonesia dalam memainkan perannya di KSST ini, penulis menggunakan Teori Bantuan Luar Negeri. **K.J. Holsti**, dalam bukunya *International politics: Framework of Analysis*, mengarikan bahwa:

**“bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima”**[[20]](#footnote-20)

Sedangkan menurut **Alan Rix** dalam bukunya *Japan’s Foreign Aid Challenge: Policy Reform and Aid Leadership*, pemberian bantuan luar negeri antara negara donor dan negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motivasi para negara donor. Motivasi yang dimaksud **Alan Rix**, yaitu:

1. **Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang melalui dukungan kerjasama ekonomi.**
2. **Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan imej negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari sektor politik domestik dan hubngan luar negeri donor.**
3. **Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan nasional ini juga memiliki sisi ekonomi.**
4. **Motif kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.**[[21]](#footnote-21)

Untuk melihat keseriusan Indonesia di KSST, Indonesia berencana akan membuat suatu bentuk Kelembagaan Tunggal yang khusus untuk menangani isu KSST ini. Melalui pembentukan lembaga penanganan KSST diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam pelaksanaan KSST. Dan hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukug pembangunan negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian bersama, atas dasar solidaritas, kepentingan bersama, dan benefit. Sesuai dengan butir pertama Nawacita Presiden RI Joko Widodo, disebutkan pula bahwa:

**“Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.”**[[22]](#footnote-22)

Teori-teori mengenai kerjasama internasional, kepentingan nasional, regonal/kawasan serta bantuan luar negeri ini menjadi kerangka acuan peneliti dalam menganalisis Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Terhadap Kesiapan Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Penanganan KSST. Lembaga penanganan bantuan luar negeri yang menangani KSST ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam mememenuhi kepentingan Indonesia sendiri di KSST.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada kerangka teori dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

**“Keanggotaan Indonesia dalam G20 mempengaruhi peran Indonesia di Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sebagai *New Emerging Donors*.”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Dalam  Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel Bebas:  Posisi Indonesia di G20 | 1. Masuknya Indonesia dalam keanggotaan G20. 2. Peran Indonesia di G20 | 1. 26 September 1999, Indonesia masuk dan terlibat saat forum G20 pertama kali dibentuk. 2. Data-Data dan fakta mengenai peran Indonesia di G20. |
| Variabel Terikat:  Penguatan peran Indonesia di KSST | 1. Tebentuknya Tim Kornas KSST. 2. Adanya isu / agenda yang telah di rencanakan dalam Grand Design dan Blue Print KSST. 3. Indonesia memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang terlibat dalam KSST. | 1. Terbentuknya Tim Kornas KSST pada tahun 2011. 2. Data – data mengenai Design dan Blue Print KSST Indonesia. 3. Data dan Fakta terkait Bantuan Teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara yang terlibat dalam KSST. |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Alur Pemikiran Pengaruh G20 Terhadap Peran Indonesia di Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST)**

Indonesia Sebagai *New Emerging Donors*

G20

INDONESIA

Indonesia Sebagai *Middle Income Country*

KSST

Negara Selatan Penerima Bantuan

Negara Donor/ Institusi Multilateral

Negara Selatan Pemberi bantuan / Negara New Emerging donors

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Induksionis, dimana keanggotaan Indonesia di G20 mempengaruhi peran Indonesia di Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) itu sendiri.

Dengan demikian, unit eksplanasi atau variabel independen pada tingkat yang lebih tinggi dari unit analisa atau variabel dependen. Hal ini menunjukkan tingkat analisis yang dipergunakan adalah induksionis.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengintepretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapaun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan Skripsi ini, maka penulis memilih teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*Library Research*) Melalui metode ini penulis memperoleh data dari berbagai literatur tertulis berupa buku, modul perkuliahan, peraturan yang berlaku, artikel di media massa cetak dan elektronikyang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen-dokumen dari instansi terkait yang mendukung topik dari Skripsi ini.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi**

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian bertempat di lokasi sebagai berikut :

1. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI yang beralamat di JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 01, 10710, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
3. Perpustakaan Umum Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat 16424.
4. Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Kota Bandung.
5. **Jadwal dan Kegiatan Penelitian**

****

1. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi ini disusun dalam lima bab yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang penulisan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka teroritis yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah penelitian, hipotesis, definisi operasional, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan oleh penulis, ruang lingkup bahasan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM G20**

Pada bab ini penulis akan menggambarkan tinjauan umum mengenai G20 dan masuknya Indonesia di G20, dan posisi Indonesia di G20.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA SELATAN SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST)**

Pada bab ini penulis akan menggambarkan tinjauan umum mengenai Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular dan penulis aka menjelaskan bagaimana kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular.

**BAB IV** **INDONESIA SEBAGAI *NEW EMERGING DONORS* DI KERJASAMA SELATAN SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST)**

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan tentang pengaruh G20 dan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan mejadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di KSST.

**BAB V PENUTUP**

Pada BAB ini akan memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tetapi jelas dan informatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan sumber-sumber dan refrensi penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM G20**

1. **SEPUTAR G20**

G20 sudah memulai aktivitasnya sejak dibentuk pada tahun 1999 di Jerman. Namun forum *intergovernmental* ini baru dikenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level Kepala Negara/ Kepala Pemerintah. G20 menjadi high profil forum dengan digelarnya KTT pertama di Washington. Pemimpin pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgensi untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia.

G20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu Negara.

G20 dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilarisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistematik. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak positif dan sistematik yang signifikan bagi Negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat tidak menjadi anggota G20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di Negara-negara lain.[[23]](#footnote-23)

Posisi G20 sebagai sebuah forum kerjasama internasional yang berlandaskan komitmen dan konsensus yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Walau tidak mengikat secara hukum, bahwa G20 secara diplomatik diakui sebagai sebuah forum yang memiliki reputasi yang tinggi.

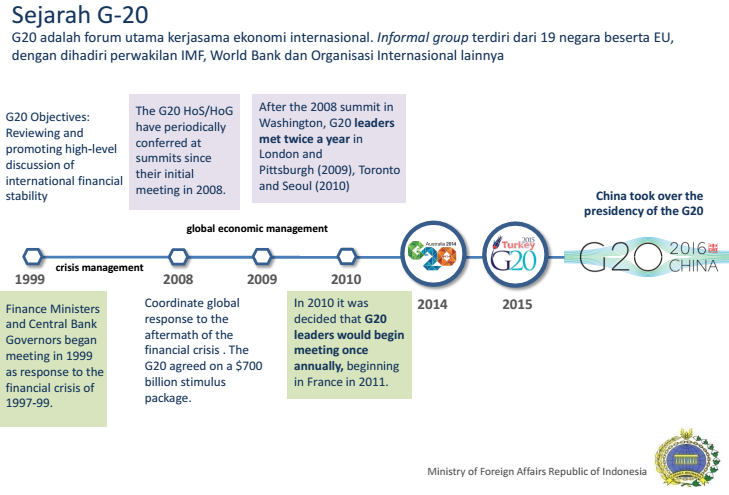
Forum ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan G-8 dalam pengertian jumlah keanggotaan. G20 lebih merefleksikan perkembangan kekuatan kekuatan ekonomi dunia terkini, yang ditunjukan dengan keanggotaan beberapa Negara yang perekonomiannya tumbuh sangat menarik dibanding dengan kerjasama-kerjasama multilateral lain yang beranggotakan padat.

Dengan asumsi ini G20 akan tetap mempertahakankan esklusivitas jumlah anggotanya. Dua tuntutan muncul sebagai implikasi dari keyakinan akan esklusivitas ini. Pertama bahwa G20 harus bisa membuktikan kemampuannya untuk membuat cara yang manjur bagi pemulihan perekonomian dunia yang stabil dan adil melalui lembaga keuangan-keuangan internasional yang ada. Kedua bahwa G20 berkepentingan untuk menjamin bahwa tingkat pertumbuuhan perekonomian keduapuluh anggotanya akan berpengaruh positif bagi perekonomian di Negara-negara non anggotanya.

Jika dilihat secara lebih detail profil masing-masing negara, anggota G20 tidaklah sekadar pengelompokkan negara maju dan berkembang. G20 sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu: negara maju anggota G-7/G-8 (Amerika, Jepang, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, Itali) dan non G-8 yaitu Australia dan Korea Selatan; negara BRICS (Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan) sebagai *emerging economies*; dan negara berkembang seperti Indonesia, Argentina, Mexico, Turki, dan Arab Saudi. Hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, dinamika proses pengambilan keputusan konsensual dalam forum ini akan sangat diwarnai kepentingan yang berbeda dari ketiga kelompok tersebut. Kedua, adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar diantara negara-negara anggota.

Faktor Faktor utama terbentuknya G20 yaitu ketergantungan antar negara semakin tinggi sehingga krisis ekonomi dapat menjalar dengan cepat kemudian Peran negara berkembang dalam perekonomian global semakin meningkat. Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya Krisis Keuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G-7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu.[[24]](#footnote-24)

1. **LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN G20**

**Gambar 2.1 Sejarah G20 2008-2016**

Sumber : Materi Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, 18 Februari 2016

Lahirnya G20 dilatarbelakangi oleh konteks globalisasi yang terus menguat. Beragam tentang globalisasi telah men-sharing-kan suatu pandangan bahwa dunia menjadi semakin kecil, dan tidak ada yang tidak rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Saling ketergantungan di antara menjadi ciri sentral dari tren globalisasi kontemporer dan dalam konteks ini kerjasama di antara Negara-negara di dunia menjadi suatu keharusan.[[25]](#footnote-25)

Serangkaian krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990-an membuktikan bahwa dunia baru membutuhkan pendekatan baru untuk merespon dunia yang semakin kecil. Nilai Peso Mexico jatuh di bulan Desember 1994 menandai krisis finansial di ini yang imbasnya dirasakan pada Negara-negara di Amerika Selatan. Indonesia, Thailand dan Korea Selatan mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 dan dampaknya dirasakan di Negara-negara di kawasan Asia. Kerentanan finansial juga dirasakan di Rusia pada tahun 1998; di Brazil pada tahun 1998-2002, Turki pada tahun 1999-2002, dan Argentina pada tahun 2000-2001. Berbagai Negara seperti China dan India telah merespon krisis dengan berbagai cara; apapun cara yang ditempuh telah beresiko pada meledaknya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat, lebih lanjut ini berdampak sistemik pada transaksi perdagangan dunia.[[26]](#footnote-26)

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1990-an tersebut menjadi perhatian serius menteri-menteri keuangan Negara-negara maju dan mengantarkan pada pengakuan bahwa sudah saatnya mereka harus mengajak Negara-negara yang perekonomiannya menguat (*emerging economies*) untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global. Adalah Paul Martin, Menteri Keuangan Kanada dan Lawrence Summer, menteri Keuangan Amerika Serikat yang kemudian mengambil inisiatif untuk memulai penyelenggaraan dialog-dialog G22 dan G33,dimana Negara-negara dengan perekonomian yang signifikan secara geografis dan ekonomik turut diundang di dalamnya. Dialog G20 yang diselenggarakan pada bulan Desember 1999 dan terus dilembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G20 disebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru *“to make a smaller world governable and fairer”* (untuk membuat dunia yang semakin kecil dapat dikelola dan lebih adil.”[[27]](#footnote-27)

G20 dapat didefinisikan sebagai sebuah komite baru untuk mengelola isu isu ekonomi global. Komite yang awalnya beranggotakan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 8 negara G-8 ditambah 10 negara dengan perekonomian yang menguat plus Australia dan Uni Eropa. G20 dipandang sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama-kerjasama multilateral yang ada. Jumlahnya yang lebih besar, sekalipun tidak terlalu besar dibandingkan G-7, memberikan peluang bagi dialog-dialog yang lebih luwes dengan hasil nyata yang lebih cepat, jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (192 negara) yang terkesan sangat lambat dalam penanganan isu-isu krusial yang dihadapi dunia. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pertemuan-pertemuan rutin pun digelar sejak pertemuan pertama G20 di Berlin, Jerman. G20 fokus pada penanganan krisis ekonomi, kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan finansial di masing-masing Negara anggota dan sebagai respon terhadap serangan teroris 9/11 di gedung kembar New York, kerjasama dalam pembekuan pendanaan terorisme. Dialog kemudian mengembangkan diskusi pada pentingnya reformasi lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods, IMF dan Bank Dunia. Reformasi ini dilihat sebagai prekondisi penting untuk memperkuat struktur finansial global yang kokoh dalam mengantisipasi krisis ekonomi di masa depan.

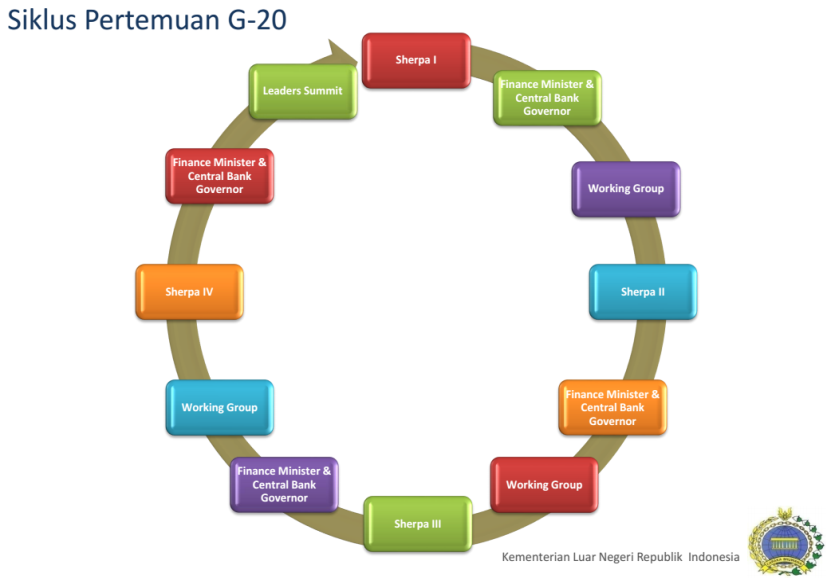
Krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin menempatkan pentingnya G20. Para pendukung pelembagaan G20 melihat perlunya peningkatan dialog G20 dari level kementrian ke level Konferensi Tingkat Tinggi. Hanya pemimpin politik yang dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang sekalipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun berimplikasi pada pemenuhan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan demikian kesepakatan yang dibuat dalam forum *intergovernmental* di tingkat tertinggi akan membawa penyesuaian-penyesuaian kebijakan di masing- masing Negara, termasuk keputusan yang sifatnya teknis. Menjadikan forum G20 di tingkat pemimpin tertinggi membuat keputusan-keputusan yang dibuat dalam forum tersebut menjadi ‘*implementable*’(bersifat dapat diterapkan).[[28]](#footnote-28)

KTT G20 pertama diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010) dan Seoul (Nopember 2010). Ketiga KTT pertama berfokus utama pada upaya darurat dalam merespon krisis finansial. Koordinasi makro dilakukan untuk mengelola toxic asset dan rekapitalisasi perbankan dan stimulus sebesar 2% PDB. Dalam KTT Washington, pemimpin-pemimpin G20 menyepakati tindakan-tindakan mendesak yang harus dilakukan seperti mengupayakan secara serius tindakan-tindakan untuk menstabilisasi finansial; mendukung kebijakan moneter yang tepat dan diperlukan bagi kondisi Negara; menggunakan kebijakan-kebijakan untuk menstimulasi permintaan Negara bagi dampak yang cepat sementara tetap menjaga kerangka kebijakan yang kondusif bagi keberlanjutan; membantu Negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses bagi keuangan dalam kondisi finansial yang sulit termasuk melalui fasilitas likuiditas dan dukung dukungan program; mendukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) untuk menggunakan kemampuannya untuk mendukung program-program pembangunan; dan menjamin bahwa IMF, Bank Dunia dan Bank-bank pembangunan lain mempunyai sumber dana yang mencukupi dalam memainkan peran mereka dalam menangani krisis.[[29]](#footnote-29)

Dalam KTT di Washington ini juga disepakati lima prinsip dalam reformasi pasar finansial dan rejim regulasi untuk menghindarkan krisis serupa dimasa yang akan datang. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas; (2) Peningkatan Regulasi yang kuat; (3) Promosi integritas dalam Pasar Finansial; (4) Promosi kerjasama internasional; (5) Reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional.[[30]](#footnote-30)

Untuk menghindari perdebatan yang sering terjadi di KTT lain, G20 fokus pada komonalitas di antara anggota-anggotanya. KTT mengadopsi prinsip-prinsip esensial yang tidak hanya membentuk citra dan nilai simbolik, tetapi juga meningkatkan profil G20 yang penting secara politik. Ini penting untuk membuat G20 dapat memulai suatu diskusi tentang bagaimana membangun stabilitas dan kapabilitas untuk mengelola krisis ekonomi, isu-isu yang otoritasnya berada di tangan menteri-menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Selain pertemuan tingkat tinggi, pertemuan pejabat senior, menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 juga memiliki organ pertemuan Sherpa. Pertemuan Sherpa diselenggarakan sebelum KTT yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan isu-isu yang secara khusus akan diagendakan dalam KTT. [[31]](#footnote-31) Dengan demikian pertemuan di tingkat *leader* dapat menjadi lebih efektif karena lebih fokus pada masalah-masalah dan kepentingan komonalitas dengan pendekatan yang lebih disepakati bersama di tingkat pejabat senior, kementerian dan pejabat Sherpa.

**Gambar 2.2 Siklus Pertemuan G20**

Sumber : Materi Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, 18 Februari 2016.

1. **G20 Sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi**

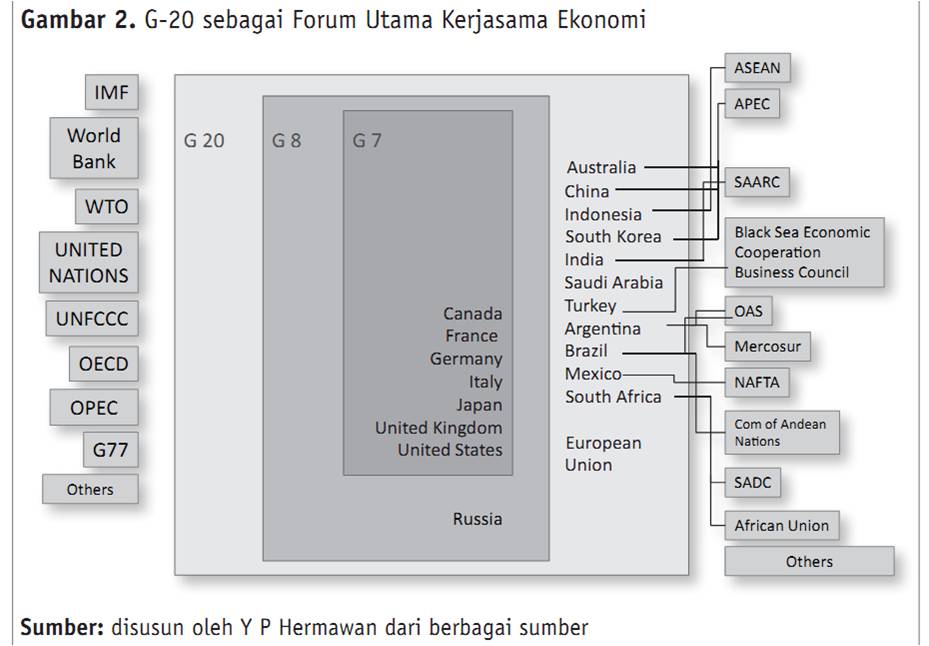
KTT G20 di Pittsburgh menghasilkan kesepakatan yang penting khususnya menyangkut peran G20 di masa yang akan datang. Deklarasi finalnya menekan bahwa pemimpin-pemimpin G20 sejak KTT di Pittsburgh akan bertemu secara regular dan menjamin bahwa delegasi-delegasi mereka akan berusaha hadir dan berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan. Ini menegaskan eksistenasi G20 yang awalnya terkesan bersifat *ad-hoc*  menjadi ‘permanen’ untuk jangka waktu yang relative panjang. Deklarasi ini menegaskan dua nilai penting, yaitu sifatnya yang ‘permanen’, pengakuan G-7 terhadap peran *emerging economies* dan peran kunci G20 sebagai forum kerjasama ekonomi global maupun regional.

1. **Dari komite *ad hoc* ke lembaga permanen**

Deklarasi di Pittsburg menegaskan bahwa pemimpin G20 bertekad untuk membuat kehadiran G20 lebih bersifat permanen. Pemimpin-pemimpin G20 menyadari bahwa penyelesaian krisis ekonomi membutuhkan solusi yang permanen bukan solusi *ad hoc.* Untuk itu diperlukan lembaga yang bersifat permanen pula yang memiliki tugas utama untuk membangun arsitektur finansial global yang tahan terhadap krisis.

G20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerjasama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerjasama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional. Setiap negara harus mengupayakan sejumlah kebijakan dalam upaya merespon krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis,dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang melalui penguatan sektor keuangan domestik.

Makna ketiga dari deklarasi pemimpin G20 adalah penempatan G20 sebagai‘referensi utama’ dari kerjasama ekonomi lain terutama yang melibatkan keanggotaan mereka. Mempertimbangkan kekuatan ekonomi masing-masing anggota G20, penempatan sebagai forum utama menjadikan G20 dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya sebagai referensi utama bagi aktivitas negara-negara anggotanya, termasuk menjadi rujukan bagi perilakunya di forum-forum serupa baik di tingkat regional maupun di tingkat global.

 **Gambar 2.3 G20 Sebagai Forum Utama Kerjasama Ekonomi**

Sumber disusun oleh Y P Hermawan dari berbagai sumber

Dengan demikian, setiap anggota G20 akan memegang komitmen yang telah mereka buat dalam G20 dan memenuhinya di tingkat domestik masing-masing. Setiap anggota G20 juga bertanggungjawab untuk membawa komitmen yang dibuatnya sebagai rujukan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di forum-forum internasional lain dimana mereka menjadi anggotanya.

1. **G20 sebagai *extra-ordinary club***

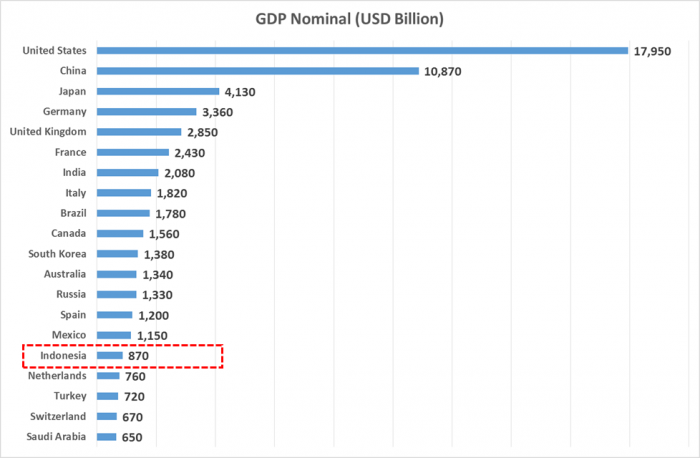
G20 bagaimanapun harus dilihat sebagai suatu klub baru, namun dengan jawab yang lebih inklusif. Sebagai klub, forum ini hanya melibatkan sejumlah Negara anggota (19 negara bangsa) dan satu organisasi regional (Uni Eropa) ; sejumlah anggota ini pula yang berkewajiban hadir dalam pertemuan-pertemuan G20 baik di tingkat pejabat senior, kelompok kerja, di tingkat kementerian keuangan dan gubernur bank, di tingkat Sherpa maupun di tingkat KTT. Sejumlah anggota tersebut pula yang ‘memiliki’ hak untuk menyepakati sejumlah komitmen-komitmen dan tentu saja mereka pula yang bertanggungjawab untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Sebagai sebuah klub, G20 harus memberikan manfaat kepada anggota-anggota karena manfaat itu pula yang akan mendorong keterlibatan anggota-anggota untuk tetap aktif. Kesuksesan sebuah klub yang bermanfaat juga sangat tergantung pada kemampuan Negara-negara anggotanya untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat dalam klub tersesbut. [[32]](#footnote-32)

Namun demikian, G20 bukanlah *ordinary club* (klub biasa). G20 adalah klub dengan anggota terbatas namun memiliki tujuan ambisius yang membawa dampak global. G20 mengklaim bahwa mandatnya adalah :*“Untuk memberikan kontirbusi bagi penguatan arsitektur finansial internasional dan untuk menciptakan peluang-peluang bagi dialog tentang kebijakan-kebijakan nasional, kerjasama internasional dan lembaga-lembaga finansial internasional yang dapat membantu mendukung pertumbuhan dan pembangunan di seluruh dunia.”[[33]](#footnote-33)*

Mempertimbangkan kerjasama ekslusif ini, G20 berkeyakinan dapat membawa manfaat yang bukan hanya dapat dinikmati oleh keduapuluh anggotanya, tetapi juga sekira 170 negara lain yang tidak tergabung dalam G20. Keyakinannya adalah kalau 19 negara plus Uni Eropa berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan dan seimbang, perekonomian dunia akan menjadi kuat, berkelanjutan dan stabil.

Untuk mencapai sasaran tersebut, G20 melakukan dua pendekatan sekaligus : (1) Pertama, kelompok ini merangkul Negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. (2) Kedua, kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global. Daya beli masyarakat Indonesia akan meningkat dan dengan demikian akan menjadi ‘pembeli’ produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dari Negara-negara tetangga.

Pendekatan kedua menjamin keberlangsungan tata pengaturan finansial global yang lebih kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam G20. Bank Dunia dan IMF adalah lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods* yang sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dan pembangunan dunia.

 **Gambar 2.4 GDP Negara-negara Anggota G20**

Sumber Informasi : World Bank (2015) – PDB Indonesia pada peringkat 16 sebesar USD 870 Miliar.

Berdasarkan jumlah PDB, 20 negara tersebut (USD 58.900 Miliar) mewakili 80% PDB Global (USD 73.440 Miliar) dan sejalan dengan Prinsip Pareto.[[34]](#footnote-34) Merekalah yang selama ini telah memainkan peran untuk membantu Negara-negara dalam menjaga stabilitas perekonomian domestik baik di masa normal maupun krisis. Lembaga-lembaga tersbut cukup krusial mengingat dana yang dimilikinya dapat membantu pendanaan pembangunan domestik Negara-negara anggotanya.

Negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan, finansial dan moneter, guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang seimbang di antara negaa mereka. Kebijakan-kebijakan ini tertuang dalam kerangka bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang oleh setiap anggota G20 untuk membuat kebijakan nasional yang terkoordinasi.

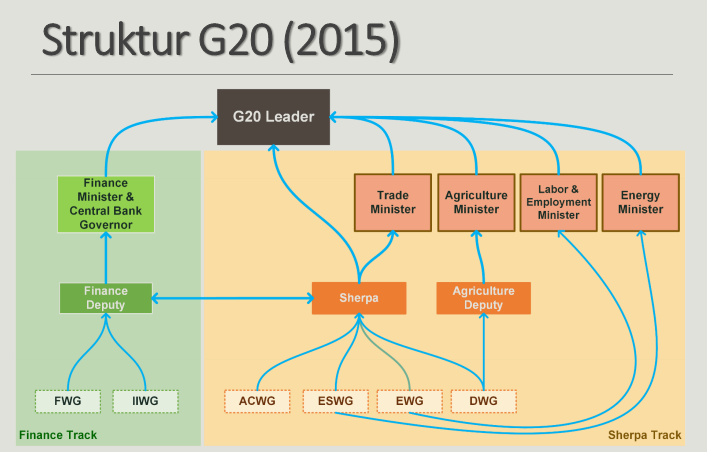
Untuk mendukung pencapaian yang maksimal, G20 juga mengundang Negara-negara dan organisasi regional non anggota yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi pertemubuhan perkonomian global yang seimbang. Dalam hal ini, G20 tetap harus dilihat sebagai G20 plus[[35]](#footnote-35), yang prinsipnya tetap terbuka bagi “keikutsertaan” Negara atau lembaga non anggota untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Dalam KTT-KTTnya, G20 mengundang kehadiran *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), *the World Trade Organisation* (WTO), *the Financial Stability Board* (FSB), *the United Nations, the New Partnership for Africa Development* (NEPAD) dan *the Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) sebagai pengamat observer. Di KTT London, *International Labour Organisation* (ILO) juga menjadi yang diundang dalam pertemuan pemimpin G20.[[36]](#footnote-36)

**Gambar 2.5 menunjukan G20 Sebagai Steering Committtee**

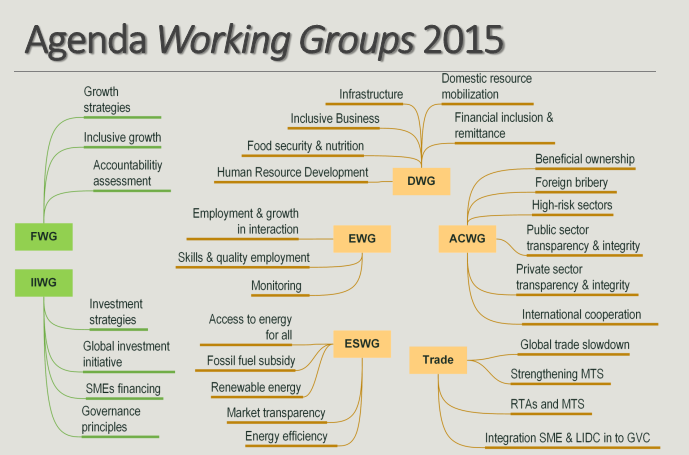
1. **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20**

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diselenggarakan untuk merespon krisis finansial 2007–2010 dan sebagai tanggapan terhadap anggapan bahwa Negara berkembang tidak cukup dilibatkan dalam diskusi dan pengaturan inti ekonomi global. KTT G20 tingkat kepala Negara atau kepala pemerintah diselenggarakan sebagai tambahan pertemuan Menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang tetap diselenggarakan untuk mempersiapkan KTT dan menerapkan keputusannya.

1. **KTT Kepala Pemerintah**
2. Pada tahun 2008 di Washingthon, dengan pokok pembahasan menahan memburuknya kondisi pasar modal dan meningkatkan regulasi sector keuangan.
3. Pada tahun 2009 di London, dengan pokok pembahasan Stimulus menghindari depresi, tambahasan dan bagi IMF dan MDBs untuk pencegahan krisis.
4. Pada tahun 2009 di Pittsburgh, dengan pokok pembahasan Dukungan bagi pemulihan perekonomian global, reformasi institusi keuangan global (IMF, Worldbank).
5. Pada tahun 2010 di Toronto, dengan pokok pembahasan konsolidasi kebijakan fiskal diikuti dengan perbaikan rasio utang dan reformasi struktural.
6. Pada tahun 2011 di Cannes, dengan pokok pembahasan menagatasi kerawanan ekonomi jangka pendek dan memperkuat faktor pertumbuhan jangka menengah, memperbaiki produksi pertanian dan peningkatan informasi dan transparasi pasar.
7. Pada tahun 2012 di Los Cabos, dengan pokok pembahasan Kebijakan domestik untuk memperkuat permintaan, pertumbuhan serta kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan, Anti proteksionisme dalam perdagangan dan investasi, melanjutkan agenda pembangunan.
8. Pada tahun 2013 di St. Petersburg, dengan pokok pembahasan Reformasi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan keseimbangan yang dilengkapi dengan monitoring implementasi komitmen sebelumnya dan perbaikan system perepajakan internasional dengan BEPS.
9. Pada tahun 2014 di Brisbane, dengan pokok pembahasan Target tambahan pertumbuhan ekonomi 2% tahun 2018 dan pendirian *Global Investment Hub.*
10. Pada tahun 2015 di Antalya, dengan pokok pembahasan Pertumbuhan inklusif dan peningkatan kerjasama dengan Negara terbelakang.
11. Pada tahun 2016 di Hangzhou, dengan pokok pembahasan *breaking a new path for growth, more efficient global economi and financial governance, robust international trade and investment, inclusive and interconnected development.*

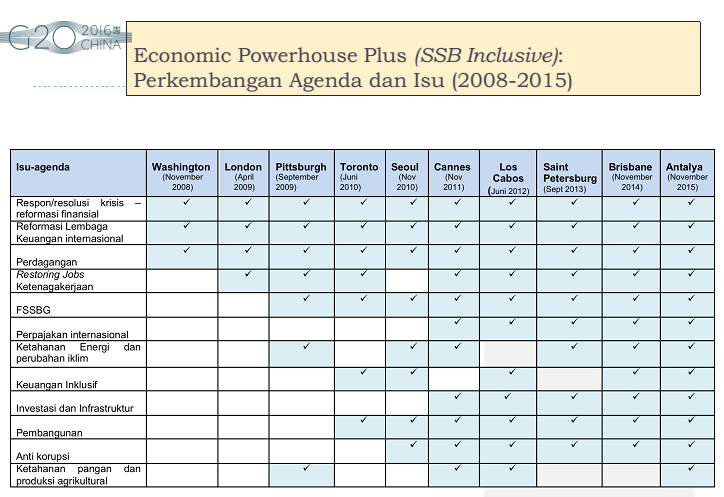
**Gambar 2.6 Struktur G20 (2015)**

Sumber : Materi Asdep Multilateral Kemenko Perekonomian RI

**Gambar 2.7 Agenda Working Groups G20**

Sumber : Materi Asdep Multilateral Kemenko Perekonomian RI

1. **Hasil KTT G20 tahun 2015**
2. **Perubahan Iklim**
3. Komitmen menjaga suhu di bawah 2 celcius dan adopsi skema baru yang berkekuatan hukum di bawah UNFCCC.
4. Dukungan implementasi Sustainable Development Goals.
5. Mendorong pertemuan COP21 untuk melahirkan kesepakatan yang ambisius dan mencakup mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan pengembangan teknologi.
6. Pengakuan terhadap sejumlah Negara yang telah menyampaikan dokumen *Intended Nationally Determined Contributi on (*INDC) kepada UNFCCC.
   1. **Pertumbuhan ekonomi global dan pembangunan**
7. Komitmen tambahan pertumbuhan PDB sebesar 2% di tahun 2018.
8. Kesepakatan untuk menyesuaikan strategi pertumbuhan masing-masing anggota G20 untuk mencapai target 2% agar tetap relevan dengan kondisi perekonomian, prioritas kebijakan dan tantangan struktural.
9. Komitmen untuk menerapkan pembangunan dan pertumbuhan yang inklusif.
10. Mendukung penciptaan lapangan kerja untuk menunjang target penurunan pengangguran muda 15% pada tahun 2025.
    1. **Perdagangan internasional**
11. Saling mengoordinasikan usaha untuk meningkatkan perdagangan dan investasi global.
12. Mendorong masuknya seluruh pemangku kepentingan, termasuk SMEs di Negara berkembang, ke dalam *Global Value Chain (*GVC).
13. Menegaskan kembali komitmen untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksionis dalam perdagangan dan investasi.
14. Dukungan terhadap penguatan multilateral trading system (MTS) melalui WTO.
    1. **Anti korupsi**
15. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam membangun kultur anti korupsi.
16. Mendorong transparansi pada sector publik.
17. Mempertegas komitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya mengurangi *bribery*, mendukung asset *recovery*, dan menghapuskan *safe haven* bagi para koruptor , dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan sistem hukum nasional masing-masing anggota G20.
    1. **Energi**
18. Perluasan akses energi (fase 1 di kawasan Sub-Sahara Afrika).
19. Kesepakatan untuk memperluas kerja sama pengembangan dan penggunaan energi oleh seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan pengesahan G20 *Principles on Energy Collaboration.*
20. Mendorong untuk ditingkatkannya efisiensi energi, investasi pada clean energy, transparansi pasar energi, serta pengurangan subsidi BBM.

**Gambar 2.8 Perkembangan Agenda dan Isu (2008 – 2015)**

Sumber : Materi Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI, 18 Februari 2016

1. **Anggota G20**

G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan tiga anggota: ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikut. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan. Ketua tahun berjalan membuka sekretariat tidak tetap yang buka hanya selama masa tugasnya.

Sebagian besar anggota adalah Negara-negara dengan Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (PPP) terbesar dengan sedikit modifikasi. Belanda, Polandia, dan Spanyol, yang termasuk big 20, diwakili oleh Uni Eropa. Iran dan Taiwan tidak diikutsertakan. Thailand juga tidak diikutsertakan, walaupun posisinya di atas Afrika Selatan. Berikut ini adalah Negara-negaraota anggota G20 dan Populasi penduduknya :

**Tabel 2.1 anggota G20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Negara Anggota** | **Ibukota** |
| 1 | Afrika Selatan | Cape Town |
| 2 | Amerika Serikat | Washington DC |
| 3 | Arab Saudi | Riyadh |
| 4 | Argentina | Buenos Aires |
| 5 | Australia | Canberra |
| 6 | Brasil | Brasilia |
| 7 | Inggris (Britania Raya) | London |
| 8 | China (Tiongkok) | Beijing |
| 9 | India | New Delhi |
| 10 | Indonesia | Jakarta |
| 11 | Italia | Roma |
| 12 | Jepang | Tokyo |
| 13 | Jerman | Berlin |
| 14 | Kanada | Ottawa |
| 15 | Korea Selatan | Seoul |
| 16 | Meksiko | Ciudad de México |
| 17 | Perancis | Paris |
| 18 | Rusia | Moskwa |
| 19 | Turki | Ankara |
| 20 | Uni Eropa | Brussels |

1. **KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM G20**

Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum *intergovernmental* ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia klub ekslusif ini merupakan wilayah bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia memahami posisi strategis dan tanggungjawab untuk mewakili Negara-negara berkembang. Pertama Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang karena pertumbuhann ekonominya tercatat cukup penting di antara Negara-negara berkembang lainnya. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga, Indonesia merupakan Negara demokrasi baru dengan keanggotaan Indonesia dapat memberikan insiprasi ke Negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi. Keempat, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan anggota satu-satunya ASEAN yang menjadi anggota tetap G20. Tentu saja bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang di masa lampaunya pernah mengalami krisis ekonomi dahsyat dan kini telah berhasil mengatsainya perlahan dengan relative baik sehingga bisa bergabung dengan anggota G20.[[37]](#footnote-37)

1. **Alasan Indonesia bergabung dengan G20**

Ada beberapa alasan yang mendasari bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari G20, faktor yang paling utama yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam G20 adalah karena PDB dari Indonesia adalah salah satu yang tertinggi dan menduduki peringkat 16 sebagai negara dengan PDB tertinggi di dunia, selain itu G20 sendiri merupakan sebuah forum ekonomi yang penting di mana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.

Dengan menjadi anggota G20 tentunya akan memberikan kepercayaan terhadap Indonesia dalam menjaga perekonomian agar mampu bertahan dalam krisis besar yang melanda dunia. Selain itu Indonesia masih mengakui bahwa daya saing nasionalnya masih lemah dan karenanya Indonesia perlu untuk membuat upaya serius untuk meningkatkan daya saing tersebut, dengan menjadi anggota G20 diharapkan bisa ikut menaikannya. Dan dengan menjadi anggota G20 Indonesia berharap citra Indonesia maupun ekonomi di dunia global mampu dilihat sebagai suatu negara yang mempunya perekonomian yang baik, hal ini tentu berkaitan dengan citra ekonomi Indonesia di dunia internasional. Selain itu dengan menjadi anggota G20 Indonesia telah menerapkan prinsip *thousand friends zero enemy* sehingga secara tidak langsung Indonesia telah memberikan citra yang baik di kancah Internasional.

Lebih jauh lagi kenapa Indonesia bergabung dengan G20 adalah bahwa posisi Indonesia dalam G20 akan menjadi jalan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi dan pada saat yang sama membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dunia, hal ini di karenakan karena posisi Indonesia yang sudah dianggap penting dalam kancah perpolitikan dunia.

Bagi Indonesia, keanggotaannya didalam G20 merupakan terobosan atau *breakthrough* sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menguatkan identitasnya. Indonesia juga berkepentingan untuk ikut serta menentukan arsitektur kebijakan ekonomi politik internasional (Weck, 2013:1). Sejak resmi menjadi anggota G20 tahun 2008, Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan forum ini sebagai sarana untuk membangun persepsi atau image Indonesia dimata dunia. Indonesia meyakini bahwa G20 merupakan forum *“economic powerhouse”* dan *“civilisational powerhouse”* karena forum tersebut adalah gabungan dari negara-negara dengan tingkat ekonomi besar dilintas peradaban serta benua (Yudhoyono, 2009). Saat pertemuan KTT G20 di Brisbane, Australia dibulan November 2014, Presiden Joko Widodo juga menjadikan forum ini sebagai salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia dimasa pemerintahannya dalam rangka mendorong modernitas pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kerangka besar “Poros Maritim Dunia” (Rahman, 2014; Salampessy, 2014).

Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, Indonesia telah banyak dipandang sebagai tumpuan yang mampu menjembatani kepentingan negara-negara ASEAN di G20 (Hermawan dkk., 2011:84).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan Indonesia di G20 juga diharapkan bisa menjadi salah satu aktor penting yang mampu menjadi ‘jembatan’ yang mengharmoniskan hubungan antar peradaban atau *harmony among civilisations*, khususnya antara Barat dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Selain itu, identias politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga diyakini sangatlah relevan serta mampu memberikan konstruksi positif di G20, khususnya dalam mengikis persepsi negatif *the clash of civilization* atau benturan antar peradaban yang telah diprediksikan akan terjadi, khususnya antara peradaban Barat dengan peradaban Islam setelah berakhirnya masa Perang Dingin ditahun 1990-an (Yudhoyono, 2009).

1. **Kepentingan Indonesia dalam G20**

Penelitian ini menemukan setidaknya tiga kepentingan spesifik yang Indonesia perjuangkan dalam proses G20. Kepentingan tersebut mencakup untuk mengatasi krisis ekonomi, untuk meningkatkan daya saing nasional dan untuk memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

Peran Indonesia dalam setiap KTT G20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain: usulan pembentukan *global expenditure support fund*, menghindari pembahasan *exit strategy* paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku (*bridge builder*). Lebih lanjut peran tersebut antara lain:

1. Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G20.
2. Semangat G20 yang mendorong *equality, trust building* dan berorentasi solusi menjadikan forum G20 menjadi forum yang demokratis di mana semua negara mempunyai kesempatan untuk *speaking on equal footing* dengan negara manapun. Indonesia perlu terus menjaga karakteristik dasar G20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan sikap/posisi dari negara-negara anggota G20.
3. Pergeseran posisi Indonesia dari negara *low income countries* menjadi negara *middle income countries* serta dari negara penerima bantuan menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profil Indonesia di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia di G20 menjadi penting karena G20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.
4. Mengingat Indonesia mempunyai cukup banyak *success stories* dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G20 dapat digunakan untuk mengedepankan pengalaman Indonesia sebagai kontribusi global Indonesia dalam pembahasan forum G20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung (program BLT). Indonesia dapat bekerjasama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai *success stories* Indonesia.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi global, secara umum kawasan Asia menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa negara berkembang di kawasan ini bahkan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, Indonesia bersama-sama negara di kawasan Asia Pasifik, perlu terus mendorong peran penting kawasan dalam proses *recovery* dan pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia berkepentingan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. [[38]](#footnote-38)

1. **Penanangan krisis Ekonomi**

Menjadi anggota G20 pertama-tama memberikan Indonesia suatu kepercayaan lebih untuk menjaga perekonomian mampu bertahan dalam krisis besar yang melanda dunia. Sejak G20 menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri pertama di tahun 1999, G20 telah memfokuskan diri pada cara-cara efektif untuk menangani krisis tersebut. Diyakini bahwa tindakan kolektif sangatlah penting untuk mengatasi krisis ekonomi.

Indonesia telah mengalami sedikitnya dua krisis ekonomi ejak tahun 1990an. Krisis pertama terparah terjadu 1997-1998 yang ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis moneter ini kemudian berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia secara luas, bahkan terjadi krisis multidimensional pada bidang sosial, politik, budaya dan ketahanan. Pada krisis pertama, angkat pengangguran meledak menjadi sekitar 40 juta. Hal tersebut menjadi masalah besar karena mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti contoh kriminalitas.[[39]](#footnote-39) Gizi buruk juga akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Krisis kedua terjadi pada tahun 2008 yang merupakan imbas dari krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat. Walaupun pada krisis kali ini tingkat pengangguran di Indonesia tidak setinggi krisis sebelumnya, Indonesia tetap menerima dampak negatifnya. Pada krisis ini para produsen lokal menghadapi masalah untuk menjual produk-produk di pasar global seperti Amerika Serikat, karena kemampuan *potential global buyers* (masyarakat di Negara maju yang terkena krisis) rendah.

Setelah mengalami dua kali krisis ekonomi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi pada pembentukan arsitektur ekonomi global yang terhadap krisis serupa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi dan menghindarkan krisis serupa menjadi kepentingan Indonesia dalam G20. [[40]](#footnote-40) keduanya dapat dicapaia dengan membuat regulasi-regulasi mendesak dan berkoordinasi dengan anggota-anggota G20.

Disamping itu, pemerintah Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional untuk bersama-sama memperkenalkann kebijakan, sumber-sumber dan instrument lembaga keuangan inetrnasional dan standar-standard internasional. Indonesia telah konsisten dalam mendukung Negara-negara miskin melalui inisiatif-inisiatifnya. G20 telah menjadi forum strategis di mana pendekatan Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan pasar menangani dampak krisis dapat diaktualisasikan.

1. **Peningkatan daya saing bangsa di tingkat global**

Indonesia mengakui bahwa daya saing nasionalnya masih lemah dan karenanya Indonesia perlu untuk membuat upaya serius meningkatkannya. Daya saing bangsa dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan:

Pertama, produk domestik Indonesia masih sulit berkompetisi dengan produk-produk asing dalam pasar global karena produk-produk tersebut gagal untuk memenuhi standard kualitas internasional. Ini merupakan suatu ironi karena Indonesia telah dikenal baik sebagai negara yang memiliki sumber-sumber alam yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dan membuat produk-produk yang memenuhi permintaan internasional bagi kualitas standard. Negara-negara maju telah mengembangkan industri mereka di wilaya Indonesia dan kemudian mengekspor produk-produknya ke pasar global. Situasi ini dapat dilihat di daerah Batam, dimana Singapura menjadikan Batam sebagai daerah industrinya dengan menentukan jenis, bahan dan kualitas produk sesuai dengan standar Singapura.[[41]](#footnote-41) Tampaknya sangat banyak agenda bagi Indoneia untuk meningkatkan daya saing nasionalnya.[[42]](#footnote-42)Dengan bergabung dalam klub besar seperti G20, Indonesia berharap dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan kemampuan saingnya bagi produk-produk domestik di pasar global.

Bergabung dalam klub besar, Indonesia mendapat suat di kesempatan untuk meningkatkan credit ratingsebagai tempat aman bagi investasi asing. Investasi asing diyakin penting untuk mempromosikan sektor-sektor produktivitas yang berkualitas tinggi. Peningkatan credit rating akan menarik sejumlah besar investasi bagi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi kepentingan nasional vital.

Perspektif kedua untuk meningkatkan daya saing bangsa menekankan pentingnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*)yang lebih tinggi dalam arena internasional. Kekuatan tawar merukan faktor determinan untuk memfasilitasi proses negosiasi demi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini juga kemudian akan berdampak kepada *political influence* yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia akan mendapat *political influence* yang lebih besar daripada sebelumnya apabila ia dapat mempengaruhi negara-negara lainnya. Ketua Sherpa G20 Indonesia mengakui bahwa menjadi anggota G20 telah membantu Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar yang diperhitungkan masyarakat internasional.[[43]](#footnote-43) Suara Indonesia sekarang didengar dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain dalam forum-forum internasional. Ini karena kenyataan bahwa Indoensia memperoleh posisi strategis, dengan memiliki akses ke klub ekonomi yang sangat berpengaruh dan memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain dalam proses G20.

Menjadi anggota G20 menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global menangani krisis ekonomi telah diakui oleh negara maju dan negara berkembang. Pelaku-pelaku pasar global saat ini memiliki kepentingan yang lebih besar di Indonesia dan siap untuk berinvestasi lebih di negara ini. G20 adalah forum yang prestisius yang dapat membantu Indonesia dalam menampilkan kinerja dan prestasi positifnya di arena global.

1. **Peningkatan Citra di forum Internasional**

G20 tidak hanya forum kerjasama ekonomi tetapi juga forum dimana beragam peradaban bertemu satu sama lain. G20 adalah rumah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi dan peradaban, seperti yang dikatakan Susilo Bambang Yudhoyono, *“G20 untuk pertamakali mempertemukan semua peradaban besar… bukan saja Negara-negara barat, tetapi juga China, Korea Selatan, India, Afrika Selatan dan Negara-negara lainnya, termasuk tiga Negara dengan penduduk muslim yang besar : Arab Saudi, Turki dan Indonesia.”[[44]](#footnote-44)*

Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menunjukan pentingnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional sebagai upaya untuk membangun citra nasional. Indonesia saat ini telah mendapatkan kesempatan besar untuk semakin aktif dalam forum internasional dengan menemukan solusi terbaik bagi masalah-masalah global dan memperluas jaringannya melalui G20. Indonesia jelas ingin menunjukan citranya sebagai pencipta perdamaian dan pembangun jembatan perbedaan.

Dalam menjalankan pemulihan citra ini tentunya pemerintah Indonesia menyisipkan kepentingan ini ke dalam perangkat politik luar negerinya, antara lain ke dalam tujuan politik luar negeri, sasaran politik luar negeri, serta program dan kebijakan kementerian luar negeri RI. Disebutkan bahwa salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia adala untuk meningkatkan citra Indonesia melalui diplomasi publik.[[45]](#footnote-45) Dengan sasaran politik luar negeri untuk menguatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharana keutuhan dan integritas Negara kesatuan RI dan pemulihan ekonomi nasional.[[46]](#footnote-46) Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri memiliki program dan kebijakan untuk:

1. Meningkatkan peran aktif Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, social budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungna hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral.
2. Menyinergikan partisipasi Indonesia di G20 dengan partisipasi Indonesia pada forum-forum lainnya. Selain untuk menyosialisasikan kesepakatan G2-0 untuk mengamankan implementasi komitmen G20 di tingkat nasional, regional dan global, upaya ini juga ditujukan untuk meningkatkan legitimasi G20 dan mengurangi stigma G20 sebagai forum yang ekslusif.
3. Mempromosikan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai islam kepada Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa berdasarkan pengalamana Indonesia.
4. Meningkatkan citra Indonesia di luar negeri sebagai Negara demokratis dengan penduduk mayoritas islam.[[47]](#footnote-47)

Selain dari pihak pemerintah Indonesia, kelompok LSM pun mengakui vitalnya G20 bagi citra Indonesia. Salah satun responden dari sebuah LSM Internasional menyatakan bahwa forum G20 menjadi peluang bagi Indonesia. Indonesia tidak dipandang sebagai Negara terbelekang, tetapi benar-benar sebagai yang memiliki potensi. Di forum-forum internasional seperti G20, Indonesia menjadi dipandang sebagai Negara demokratis dan menjadi saran promosi citra Indonesia yang mendatangkan investasi bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, di dalam G20, Indonesia dapat melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Negara maju, kemudian menerapkannya pada Negara sendiri.

Dalam forum-forum internasional seperti G20, Indonesia dipandang sebagai bangsa yang demokratik dan ini memudahkan promosi citra Indonesia ; citra seperti ini akan meningkatkan kepercayaan Indonesia di mata investor asing. Lebih banyak investor asing berarti prospek yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Disamping itu, berada dalam G20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk melihat lebih dekat bagaimana Negara-negara maju untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya di Indonesia jika dipandang baik dan tepat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menempatkan G20 sebgaai forum paling strategis dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ini mengindikasikan suatu pergeseran dalam diplomasi Indonesia : Indonesia telah aktif sejak 1967. Sekarang Indonesia menambahkan G20 sebagai forum utama lain untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dengan cara pandang yang konsisten dengan tetap melihat ASEAN sebagai partner utama Indonesia.

1. **EKSISTENSI INDONESIA DI G20**

Posisi strategis Indonesia diyakini menajdi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G20. Selain potensi sebagai *global buyer* yang besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak signifikan ke stabilitas pertumbuhan ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Tengggara, dan akan lebih baik lagi lanjut dalam kestabilan perekonomian Asia dan Dunia.[[48]](#footnote-48)

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa G20 adalah forum yang pernting dan Indonesia seharusnya berpartisipasi penuh di dalamnya. Ini menjadi dorongan kuat bagi Indonesia untuk memainkan peran serius dalam pertemuan-pertemuan G20. Bagi Indonesia, G20 pertama-tama adalah sebuah forum ekonomi yang penting dimana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global. G20 telah dibentuk tahun 1999 ketika dunia menghadapi krisi ekonomi yang terjadi beberapa Negara di Asia. Pada saat itu G20 mendiskusikan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut. G20 telah memainkan peran lebih besar sejak tahun 2007 ketika krisis finansial global yang lain melanda perekonomian global.

Khususnya sejak G20 menyelenggarakan KTT pertamanya di Washington, pemimpin-pemimpin G20 mulai membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dengan cara yang terkoordinasi. Pemimpin-pemimpin melihat pentingnya kerangka pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang untuk membangun perekonomian global yang tahan terhadap krisis ekonomi serupa di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin G20 juga melihat pentingnya reformasi lembaga-lembaga finansial internasional dan pembentukan arsitektur ekonomi global yang kokoh.

Namun pemimpin-pemimpin Indonesia mengakui bahwa G20 bukan saja forum ekonomi, tetapi juga forum yang menjadi tempat pertemuan bagi beragam budaya dan peradaban. Mantan Menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa menekankan bahwa posisi Indonesia dalam G20 menjadi jalan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan diplomasi dan pada saat yang sama membantu memecahkan masalah yang dunia sedang hadapi. Pada kesempatan lain mantan Menteri luar negeri juga menyampaikan keinginannya untuk menciptakan “Kondisi dimana Indonesia betul-betul dianggap sebagai negara yang memiliki peran dan kepentingan bersifat global”. Untuk mewujudkan itu, keterlibatan Indonesia di PBB dan forum-forum multilateral lain termasuk G20 akan dimanfaatkan untuk semakin memantapkan peran Indonesia di kancah internasional. Kemudian beliau menambahkan, “G20 yang secara definisi adalah suatu kelompok terbatas, dimana Indonesia menjadi anggota tetap, menjadi alat untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai pemain yang berpengaruh di level dunia”.[[49]](#footnote-49)

Dengan demikian bagi Indonesia, G20 memiliki peran penting untuk Indonesia karena dapat membantu untuk mewujudkan citra dirinya sebagai negara yang dapat menjembatani perbedaan. Mengakui posisi penting G20, pemerintah Indonesia harus memasukan G20 dalam arah baru platform kebijakan luar negeri Indonesia. Arah ini menegaskan bahwa untuk memajukan kualitas diplomasi ekonomi dalam forum-forum multilateral Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam lembaga lembaga multilateral seperti WTO, APEC, G20 dan G-33 untuk mempromosikan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang lain.[[50]](#footnote-50)

Untuk melihat seberapa besar pengaruh ekonomi yang dimiliki Indonesia di G20 mungkin masih jauh diantara negara anggota lainnya yang memang mempunyai kekuatan ekonomi besar. Hal ini sebenarnya yang menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia, untuk bisa berdampingan dengan kekuatan besar dunia. Tentunya ada dampak negatif dan posistif yang akan dialami Indonesia. Indonesia merupakan negara ASEAN satu-satunya yang menjadi anggota G20. Selain Indonesia, ada lima negara Asia lainnya yang menjadi anggota G20 yaitu, Arab Saudi, Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Kelompok G20 ini menguasai hampir 90% total produk nasional bruto. G20 juga menguasai 80% total perdagangan dunia dan dua pertiga penduduk dunia.

Namun banyak juga kalangan yang menilai bahwa Indonesia memang layak masuk dalam kelompok negara berkembang dan berpengaruh di percaturan perekonomian global (Brasil, Rusia, India, Cina). Goldman Sachs yang merupakan perusahaan investasi perbankan di AS pernah membuat daftar sejumlah negara, seperti Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Turki dan Vietnam dalam rangka mencari BRIC baru.

Kriteria yang digunakan adalah negara dengan stabilitas ekonomi makro, kematangan politik, keterbukaan perdagangan, kebijakan investasi dan kualitas pendidikan. Ekonomi Indonesia berpotensi melakukan akselerasi di saat sebagian besar negara dunia, mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Bersama dengan Cina dan India, Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan positif di tengah krisis melanda ekonomi global selama tahun 2008-2009.

Dengan status sebagai negara nomor 16 dunia, membuat keberadaan Indonesia di G20 lebih diperhitungkan. Pendapat dan pemikiran Indonesia akan lebih banyak diakomodasi. Posisi tawar Indonesia juga akan menjadi lebih kuat ketimbang dulu ketika hanya menjadi ‘penggembira’ di forum G-8.

Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk secara lebih aktif mengutarakan pandangan-pandangan alternatif di luar dominasi negara-negara besar. Isu-isu yang dapat disuarakan Indonesia dalam forum G- 20 antara lain tentang reformasi struktural dan stabilisasi ekonomi dunia, utang, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan perdagangan.

Partisipasi aktif Indonesia pada setiap pertemuan G20 memiliki potensi besar bagi peningkatan kapasitas ekonomi domestik, terutama jika ditinjau dari perspektif perdagangan dan investasi. Singkat kata, G20 ibarat sebuah amunisi bagi Indonesia untuk mengarahkan sumber daya global bagai kepentingan ekonomi dalam negeri secara lebih optimal.[[51]](#footnote-51)

Gagasan-gagasan yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan :

1. Mengusulkan skema dana siaga global atau global expenditure Support Gund, merupakan mekanisme keuangan yang pernah diusulkan Indonesia di tahun 2008. Usulan ini merupakan sebuah inisiatf untuk membantu proses pemulihan dampak krisis di negara-negara berkembang miskin. Pada dasarnya, GESF merupakan dana cari yang disiapkan untuk membantu negara berkembang dan diharapkan aliran dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan, infrastruktur, perluasan dan penciptaan lahan pekerjaa, dan pembiayaan keberlangsungan program-program Millenium Depelopment Goals (MDGs).
2. Membentuk Co-chair Working Group 4 (WG4) yang dimotori oleh Indonesia dan Perancis. Indonesia bersama dengan Perancis menyelenggarakan pertemuan WG4 di Jakarta, 2 Maret 2009. Pada dasarnya pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinterja Bank Pembangunan Multilateral (*Mulilateral Developments Bank*) dalam mengatasi krisi serta pembenahan manajemen MDB’s dalam proses reformasi agar lebih tanggap dan efektif dalam menghadapi krisi di lain waktu.
3. Mengingatkan KTT agar tidak mengabaikan isu-isu penting lain seperti perubahan iklim, efektivitas bantuan, dan keamanan energi;
4. Memperjuangkan agar forum G20 menjadi lebih permanen dan dilembagakan.

Salah satu peranan Indonesia adalah usulan mengenai mekanisme support bagi pendanaan pembangunan di emerging markets yang berfundamental baik namun terkena imbas dari tidak berfungsinya pasar akibat dampak krisis keuangan. Sri Mulyani, sebagai wakil Indonesia menjelaskan langkah-langkah lain yang disepakati dalam pertemuan itu, yaitu pentingnya mengembalikan kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan, upaya-upaya bersama mengatasi kelangkaan likuiditas internasional, reformasi arsitektur keuangan global yang lebih mencerminkan keterwakilan negara-negara berkembang, serta mekanisme pengawasan yang lebih baik bagi sektor keuangan.

1. Proyek Riset G20, library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/08366.pdf. diakses pada tanggal 18 Februari 2017 Pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://www.academia.edu/9628653/Masih\_Relevankah\_G20\_un tuk\_Indonesia](https://www.academia.edu/9628653/Masih_Relevankah_G-20_un%20tuk_Indonesia). Diakses pada tanggal 18 Februari 2017. Pada pukul 20.15 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Kajian Membangun Kerjasama Selatan Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan*, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Jakarta, 2011, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. UNOSSC, *Paragraphs in the 2010 Seoul G20 Summit Document relevant to South-South cooperation* (paragraph 51 (i) decision), diakses 05 Desember 2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/HLC [↑](#footnote-ref-4)
5. Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H. & Tanaga, S., 2010, The Role of Indonesia in the G-20: *Background, Role, and Objectives of Indonesia's Membership, Friedrich Ebert Stiftung*, DKI Jakarta, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hermawan, Y. P. & Kasim, S. I., 2013, Kemenkeu, diakses 05 Desember 2016, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Komit men%20Indonesia%20Untuk%20ODA\_PKPPIM.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Fordelone, T. Y., 2009, *Triangular Co-operation and Aid Effectiveness*, OECD, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. IFAD, Desember 2014, South-South and Triangular Cooperation, diakses 05 Desember 2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/news/2014/sstc\_web.pdf, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Supercycle Report, Standard Chartered, 2010. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kristiyanto, dkk, *Peran Kementrian Keuangan Dalam Pengembangan KSST Indonesia 2015,* Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Rosdakarya, 1983, hlm.14. [↑](#footnote-ref-11)
12. K.J Holsti. Politik Internasional, kerangka Untuk Analisis, Jilid II. Terjemahan M. Tahrir Azari. Jakarta : Erlangga. 1988. Hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-12)
13. James E Dougherty & Pfaltzgraff Robert L. Contending Theories. New York: Harper and Row Publisher.1997, hlm.418-419. [↑](#footnote-ref-13)
14. Teuku May Ruddy, 1998, Administrasi dan Organisasi Internasional, (PT.Refika Aditama, 1998) hlm.3 [↑](#footnote-ref-14)
15. Istanto, T.Sugeng, *Studi Hubungan Interbasional*/*P. Anthonius Sitepu –Edisi pertama.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011. Hal 172 [↑](#footnote-ref-15)
16. Kokange, J.O., 2014, The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection, Global Policy Essay, July, Hlm.1 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Fadhil Irawan, “Kesiapan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik Asean Menghadapi Komunitas Asean 2015”, Jurnal HI, 2013, Hlm.24 [↑](#footnote-ref-17)
18. Snyder, Craig A. Contemporary Security and Strategy.Palgrave : Macmillan. 2008. hlm.228. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hettne,B. and Soderbaun. Theorizing the Rise of Regionnes. London : Routledge. 2002. hlm.39 [↑](#footnote-ref-19)
20. Holsti. Op.Cit. [↑](#footnote-ref-20)
21. Alan Rix, 1993, *Japan’s Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*, Routledge: London and New York, hlm.18-19 [↑](#footnote-ref-21)
22. 2016, *Visi Nawacita Dalam Politik Luar Negeri*, <http://presidenri.go.id/topik-aktual/visi-nawacita-dalam-politik-luar-negeri-indonesia.html>, diakses 18 Februari 2017, pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Proyek Riset G20, library.fes.de/**pdf**-files/bueros/indonesien/08366.**pdf.** diakses pada tanggal 12 April 2017. Pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-23)
24. Gambaran Umum G20. [https://www.ekon.go.id/berita/download/.../materi-pak-edwin.**pdf**](https://www.ekon.go.id/berita/download/.../materi-pak-edwin.pdf)**.** Diakses pada tanggal 12 April 2017. Pada pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. London: Pinter; Schlte, Jan Art (2000). Globalization: A Critical Introduction. [↑](#footnote-ref-25)
26. Tentang rangkaian krisis ekonomi dapat dilihat pada Bab 1. Genesis of L-20 project [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. Seperti disampaikan oleh Miranda Goeltom, mantan wakil Gubernur Bank Indonesia, dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh BPPK Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 3 Agustus 2010 [↑](#footnote-ref-28)
29. Summit Declaration on Financial Markets and the World Economy, 15 November , 2008 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Materi Bapak Novriady Wijaya sebagai Kepala Bidang Eropa Afrika Timur Tengah dalam seminar, Penguatan Peran Indonesia Dalam G20, 2016. [↑](#footnote-ref-31)
32. Tentang ini telah menjadi kajian para teoritisi teori klub yang menekankan benefit yang harus diperoleh oleh anggota klub sebagai determinan dari keberlanjutan suatu organisasi internasional sebagai suatu klub. [↑](#footnote-ref-32)
33. Diakses dari, [*http://www.g20.org*](http://www.g20.org), tanggal 12 April 2017, pukul 18.00 [↑](#footnote-ref-33)
34. [*http://www.mediaindonesia.com/news/read/64938/G20-harus-utamakan-pertumbuhan-ekonomi/* diakses](http://www.mediaindonesia.com/news/read/64938/G20-harus-utamakan-pertumbuhan-ekonomi/%20diakses) pada tanggal 13 April 2017. Pukul 21.00 WIB [↑](#footnote-ref-34)
35. Seperti yang disampaikan perwakilan dari IMF untuk Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010. [↑](#footnote-ref-35)
36. Fact Sheet 3: the G20, *http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/FactSheet3TheG20EN* diakses tanggal 13 April 2017. Pukul 15.50 WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. [*https://www.academia.edu/9628653/Masih\_Relevankah\_G20\_un tuk\_Indonesia*](https://www.academia.edu/9628653/Masih_Relevankah_G-20_un%20tuk_Indonesia). Diakses pada tanggal 13 April 2017. Pada pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-37)
38. [*http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/G20.aspx*](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/G-20.aspx) diakses pada tanggal 11 April 2017. Pukul 16.50 WIB [↑](#footnote-ref-38)
39. [*http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/*](http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/803/803/1/4/) diakses pada tanggal 12 April 2017. Pukul 21.15 WIB [↑](#footnote-ref-39)
40. Berita wawancara dengan koordinator G20 untuk isu-isu finansial, kementerian keuangan Indonesia. [↑](#footnote-ref-40)
41. Adriana Elisabeth, *”Kecenderungan dan Tantangan Globalisasi Ekonomi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia”* dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, LIPI Press, 2008, hal. 87. [↑](#footnote-ref-41)
42. *http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=863&l=id/* diakses pada tanggal 11 April 2017, Pukul 13.20 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
43. Seperti disampaikan oleh Ketua Sherpa G20 Indonesia dalam pidato kunci pada diskusi panel yang diselenggarakan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral,Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 20 September 2010. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono, *Towards Harmony Among Civilizations* di Universitas Harvard, [*http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-amongcivilizations-speech-by-sbt-at-the-john-f-kennedy-school-of -government-harvarduniversity/*](http://embassyofindonesia.it/towards-harmony-amongcivilizations-speech-by-sbt-at-the-john-f-kennedy-school-of%20-government-harvarduniversity/) diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 11.20 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Tujuan Politik Luar Negeri RI diambi dari [*http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id/*](http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id/) diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 12.25 WIB. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sasaran Politik Luar Negeri RI diambil dari [*http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=22&l=id/*](http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=22&l=id/) diakses pada tanggal 11 April 2017. Pukul 12.35 WIB. [↑](#footnote-ref-46)
47. Program dan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, [*http://www.deplu.go.idPages/Polugri.aspx?IDP=11&l=id*/](http://www.deplu.go.idPages/Polugri.aspx?IDP=11&l=id/) diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 13.10 WIB. [↑](#footnote-ref-47)
48. [*https://www.academia.edu/9628653/Masih\_Relevankah\_G20\_un tuk\_Indonesia*](https://www.academia.edu/9628653/Masih_Relevankah_G-20_un%20tuk_Indonesia). Diakses pada tanggal 11 April 2017. Pada pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-48)
49. *http://embassyofindonesia.it/towards-harmonyamong-civilizations-speech-by-sby-at-the-john-f-kennedy-school-of-governmentharvard-university*/, diakses pada tanggal 13 April 2017. Pukul 15.30 WIB [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid 27 [↑](#footnote-ref-50)
51. [*http://www.investor.co.id*](http://www.investor.co.id)*, “Indonesia di Pusaran G20”*, Abdul Hakim MS, [*http://www.investor.co.id/home/indonesia-di-pusaran-G20/39176*](http://www.investor.co.id/home/indonesia-di-pusaran-g-20/39176), diakses tanggal 13 April 2017, pukul 15.50 WIB [↑](#footnote-ref-51)